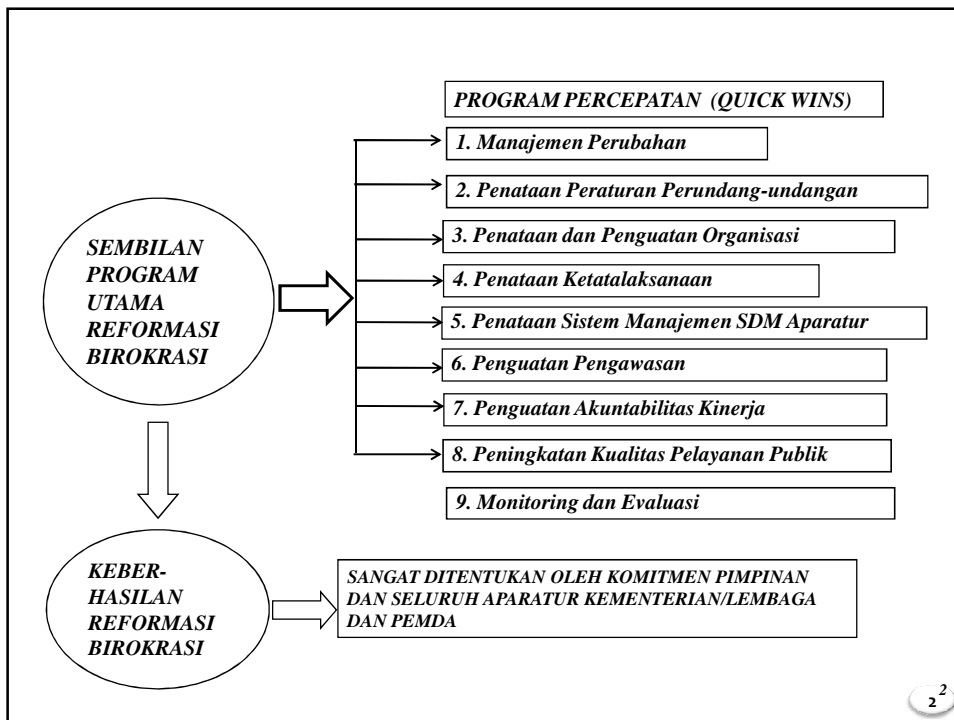
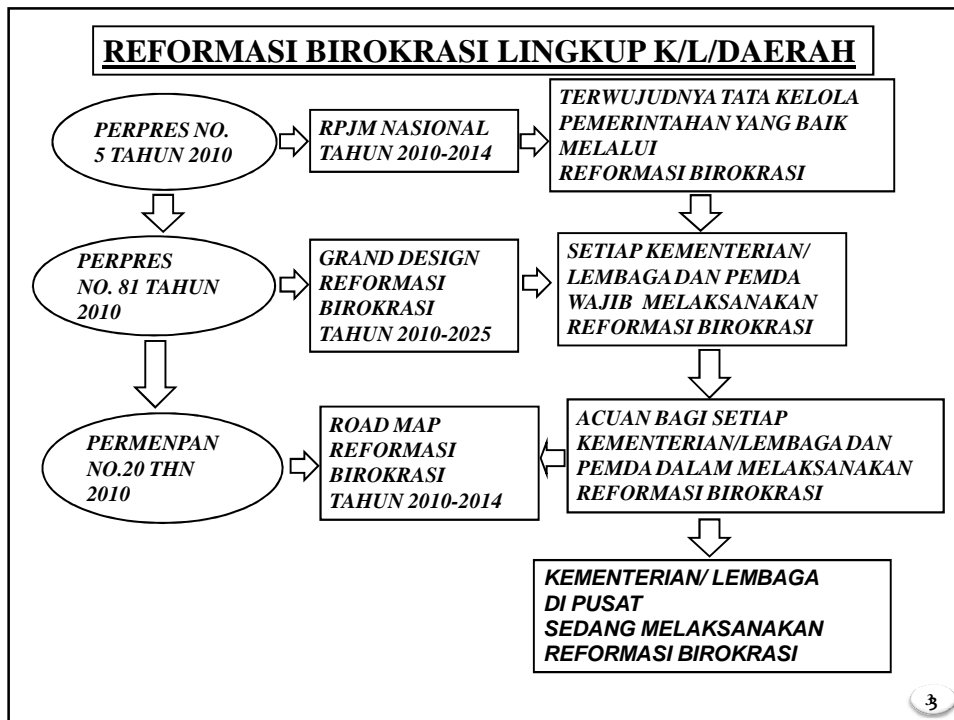


Disampaikan Oleh :
DR. MUH. MARWAN, M.Si
 DIRJEN BINA BANGDA

Disampaikan dalam Seminar Kernenpan dan RB bersama Bakohumas, 27/5/13.

1





Permasalahan yang dihadapi birokrasi di daerah sangatlah kompleks. Masa lima tahun kepemimpinan KDH, belum tentu mampu menangani semua permasalahan. RB yg bisa dirasakan langsung oleh masyarakat adalah perubahan pelayanan publik ke arah yg lbh baik.

4

ISU STRATEGIS PEMERINTAHAN DAERAH

1	• PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
2	• KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
3	• PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH
4	• PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	• PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
6	• PENYELESAIAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SKPD

5

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

PEMERINTAH TELAH MENETAPKAN
SPM 15 Bidang untuk 65 Jenis pelayanan dan 192 indikator



TUJUAN
menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata



PENERAPAN TAHUN 2014
9 SPM di PROVINSI dan 15 SPM di KABUPATEN/KOTA

Langkah –langkah yang harus dilakukan

- Laksanakan sosialisasi pada seluruh jajaran DPRD dan SKPD serta para pemangku kepentingan terkait;
- Bentuk Tim percepatan penerapan dan pencapaian SPM di pusat & daerah;
- Fasilitasi daerah untuk mengintegrasikan SPM dalam perencanaan dan penganggaran;
- Monev penerapan SPM di daerah untuk memastikan pencapaian target SPM di setiap provinsi kabupaten/kota

6

HASIL EVALUASI PTSP S.D. TAHUN 2013

Daerah	Jmlh	Membentuk PTSP				Melimpahkan perizinan dan non perizinan				Menetapkan SOP			
		SUDAH		BELUM		SUDAH		BELUM		SUDAH		BELUM	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
Provinsi	33	26	79%	7	21%	11	33%	22	67%	3	9%	30	91%
Kab.	399	345	86%	54	14%	138	35%	261	65%	56	14%	343	86%
Kota	98	96	98%	2	2%	41	42%	57	58%	17	17%	81	83%
JUMLAH	530	467	88%	63	12%	190	36%	340	64%	76	14%	454	86%

HAMBATAN

Masih rendah komitmen membentuk, melimpahkan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP, serta menetapkan SOP PTSP sehingga belum sepenuhnya menjamin adanya kepastian ketepatan waktu penyelesaian dan biaya perizinan dan non perizinan memulai berusaha di beberapa provinsi, kabupaten/kota.

7

PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH

Ketidaktegasan batas daerah:

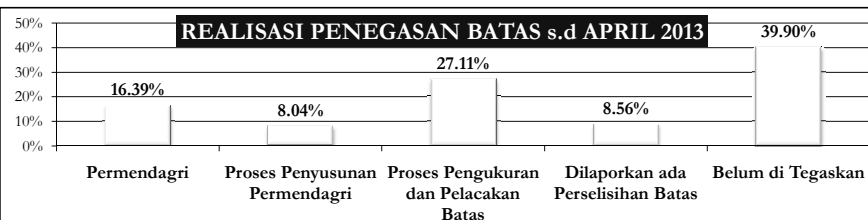
- Memicu munculnya perselisihan antar daerah
- Menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah

PENYEBAB:

Pemekaran daerah dan ketidaksinkronan antara undang-undang pembentukan satu daerah dengan daerah lainnya.

AKIBAT:

Konflik perebutan SDA dan potensi ekonomi wilayah

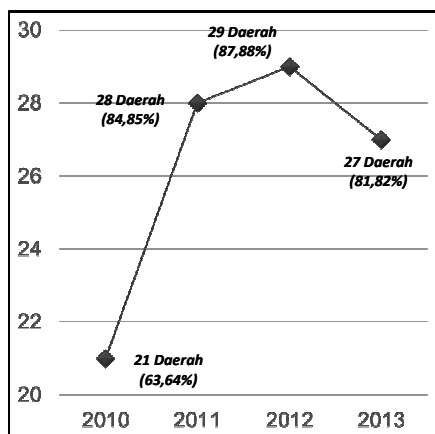


Mendorong agar Gubernur dan Bupati/Walikota meningkatkan koordinasi untuk mengatasi hambatan dan memecahkan permasalahan, sehingga penegasan batas daerah di wilayah masing-masing dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berpedoman pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, diminta kepada .

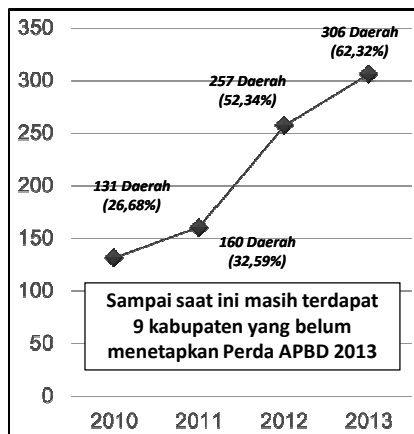
8

TINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI



KABUPATEN DAN KOTA



9

Struktur Pendapatan APBD Lima Tahun Terakhir

(dalam trilyun rupiah)

	TAHUN	TOTAL PENDAPATAN	PAD	%	DANA PERimbangan	%	LAIN2 PD YG SAH	%
NASIONAL	2009	388,34	62,69	16%	283,50	73%	42,15	11%
	2010	403,93	71,91	18%	292,61	72%	39,42	10%
	2011	477,76	90,15	19%	327,16	68%	60,45	13%
	2012	577,08	122,74	20%	381,07	66%	83,26	14%
	2013*	563,34	127,59	23%	343,70	61%	92,05	16%
PROVINSI	2009	95,91	42,51	44%	43,63	45%	9,77	10%
	2010	102,43	47,33	46%	45,02	44%	10,07	10%
	2011	119,04	59,60	50%	47,43	40%	12,01	10%
	2012	162,76	75,07	46%	54,69	34%	33,00	20%
	2013	198,20	92,45	47%	62,88	32%	42,87	22%
KABUPATEN/KOTA	2009	292,43	20,18	7%	239,87	82%	32,38	11%
	2010	301,51	24,58	8%	247,58	82%	29,35	10%
	2011	358,72	30,55	9%	279,73	78%	48,44	14%
	2012	414,32	37,67	9%	326,38	79%	50,26	12%
	2013*	365,14	35,14	10%	280,81	77%	49,18	14%

Catatan:

Diolah dari beberapa sumber (Data APBD Ditjen Keuangan Daerah dan www.djpk.depkeu.go.id)

*) Untuk tahun 2013 menggunakan data 454 daerah Kabupaten/Kota

10

Struktur Belanja APBD Lima Tahun Terakhir

(dalam trilyun rupiah)

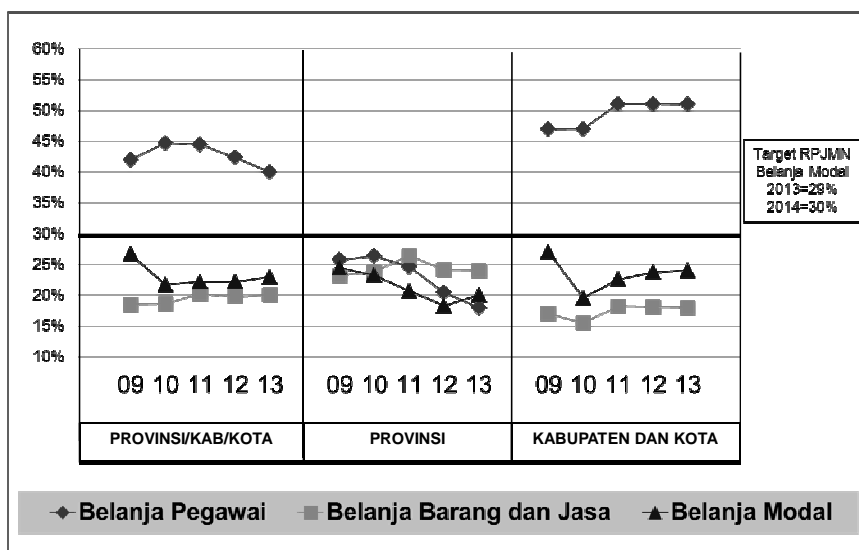
	Tahun	Total Belanja APBD	Belanja Pegawai	%	Belanja Barang & Jasa	%	Belanja Modal	%
Provinsi, Kabupaten dan Kota	2009	429,33	180,31	42	79,58	19	114,52	27
	2010	444,00	198,54	45	82,51	19	96,36	22
	2011	513,34	228,34	44	103,83	20	113,57	22
	2012	617,54	261,38	42	122,30	20	137,69	22
	2013*	604,99	239,11	40	122,81	20	138,50	23
Provinsi	2009	105,60	27,18	26	24,49	23	25,80	24
	2010	113,13	29,83	26	26,95	24	26,30	23
	2011	127,92	31,55	25	33,80	26	26,43	21
	2012	174,02	35,53	20	41,99	24	31,82	18
	2013	213,02	39,03	18	50,94	24	43,04	20
Kabupaten/ Kota	2009	322,72	151,44	47	54,92	17	87,30	27
	2010	358,94	168,70	47	55,55	15	70,06	20
	2011	385,42	196,80	51	70,04	18	87,14	23
	2012	443,53	225,85	51	80,31	18	105,88	24
	2013*	391,97	200,07	51	71,87	18	95,46	24

Catatan:

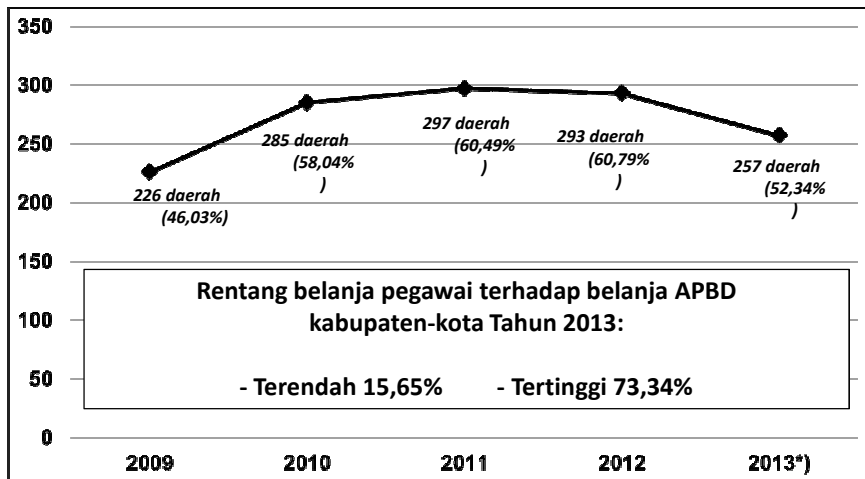
Diolah dari beberapa sumber (Data APBD Ditjen Keuangan Daerah dan www.djpk.depkeu.go.id)

*) Untuk tahun 2013 menggunakan data 454 daerah Kabupaten/Kota

11



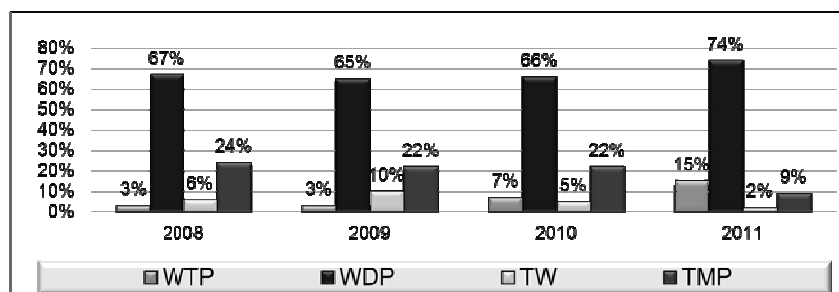
12



Catatan:
 Diolah dari beberapa sumber (Data APBD Ditjen Keuangan Daerah dan www.djpk.depkeu.go.id)
 *) Untuk tahun 2013 menggunakan data 454 daerah Kabupaten/Kota

13

TAHUN	OPINI LKPD								JUMLAH
	WTP %		WDP %		TW %		TMP %		
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	66%	26	5%	115	22%	516
2011	67	15%	322	74%	6	1%	43	10%	438

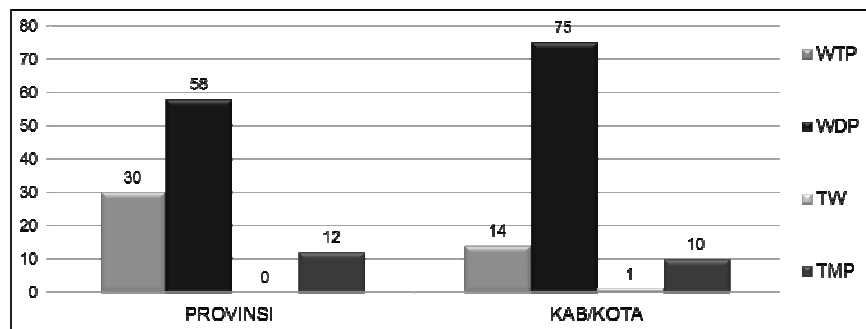


Sumber: Diolah dari data BPK- RI

14

**Opini BPK Hasil Audit LKPD Provinsi, Kabupaten/Kota
Tahun 2011**

DAERAH	LKPD TAHUN 2011								JMLH
	WTP		WDP		TW		TMP		
PROVINSI	10	30%	19	58%	0	0	4	12%	33
KAB/KOTA	57	14%	303	75%	6	1%	39	10%	405
JUMLAH	67	15%	322	74%	6	1%	43	10%	438



15

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

DASAR HUKUM

- PERPRES No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012–2014.
- INPRES No 1 Tahun 2013 ttg Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.
- SE MENDAGRI No 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2013.

TUJUAN

Peningkatan nilai indeks persepsi korupsi Indonesia dari 3 pada Tahun 2012 menjadi 5 pada Tahun 2014.

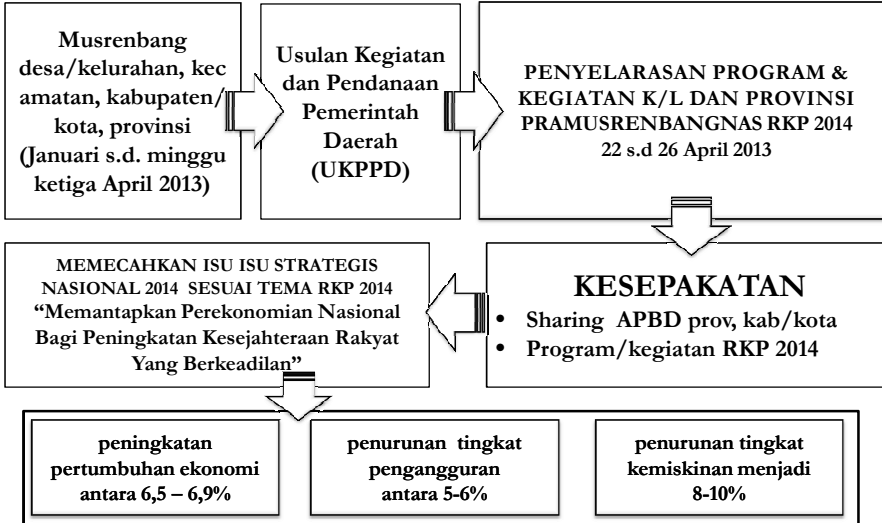
SASARAN

7 RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD PPK) PEMDA TAHUN 2013

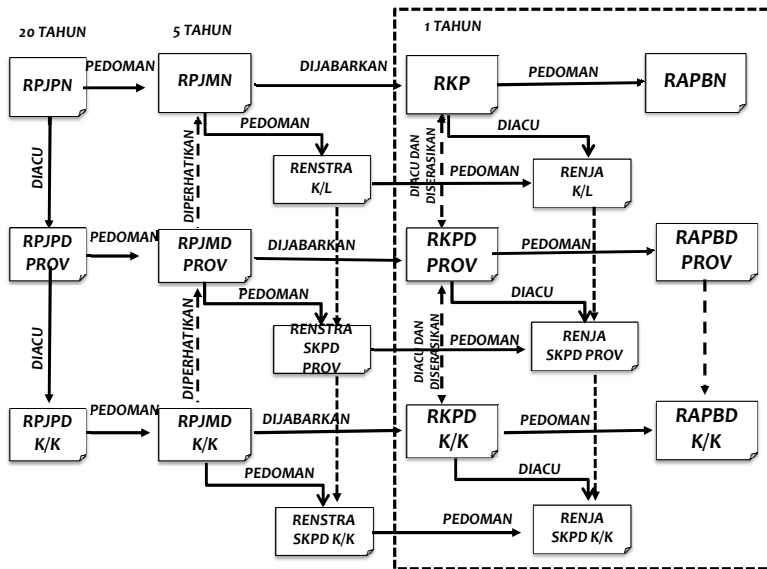
1. Pembentukan PTSP bagi pemerintah daerah yang belum membentuk PTSP;
2. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada PTSP;
3. Publikasi standar PTSP (bagi pemerintah daerah yang sudah membentuk PTSP);
4. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP;
5. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
6. Publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah;
7. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

16

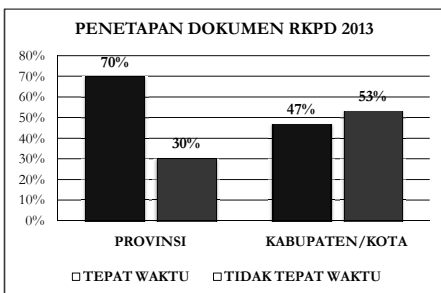
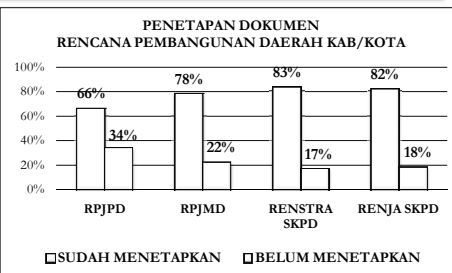
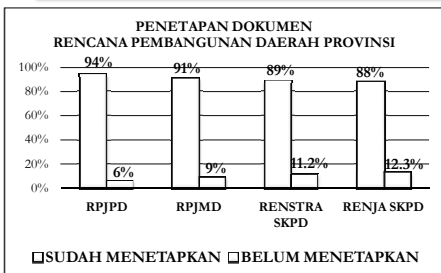
SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RKP 2014



SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH DALAM SATU KESATUAN SITEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



**PENYELESAIAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SKPD**



KEWAJIBAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA BERSAMA DPRD, SESUAI DGN AMANAT UU NO 32 THN 2004

- Tetapkan Perda RPJPD 2005-2025 agar visi dan misi calon kepala daerah terpilih memiliki landasan hukum dan tetapkan Perda RPJMD tepat waktu, agar penyusunan & penetapan RKPDP, KUA-PPAS dan APBD Tahun 2014 memiliki landasan hukum.
- Tetapkan Perkada RKPDP 2014 tidak melampaui batas waktu sehingga APBD TA 2014 dilaksanakan 1 Januari 2014 agar daya serap serta target kinerja setiap triwulan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- Tetapkan Renstra SKPD selaras dengan RPJMD, Renja 2014 dgn RKPDP 2014 sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja sesuai tugas & fungsi masing-masing.

Kelengkapan tersedianya dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD akan menjadi kriteria utama pemberian alokasi dana insentif kepada daerah dan perolehan opini atas hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI

